

SKRIPSI

**PENERAPAN KETENTUAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MELALUI SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing :

- 1. Frenadin Adegustara, S.H., M.S**
- 2. Darnis, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2016

**PENERAPAN KETENTUAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL MELALUI SASARAN KERJA PEGAWAI DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(Giska Yunike, 1210111022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86
Halaman, Tahun 2016)**

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang pemerintah telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*). Hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (2). Dalam institusi pemerintah telah dikenal instrumen penilaian kerja bagi PNS yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Berangkat dari proses penilaian yang tidak obyektif dan terukur serta kurangnya manfaat atas penilaian kerja ini DP3 tidak lagi ditempatkan sebagai alat utama untuk mengukur dan melihat prestasi Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dalam kebijakan ini digunakan pendekatan baru dalam mengukur kinerja PNS yaitu melalui penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku kerja. Hal ini tentu berbeda dengan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disingkat DP3 sebelumnya yang berlaku sama untuk seluruh PNS. Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana Penerapan Ketentuan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ? 2) Bagaimana Penerapan Ketentuan Penilaian Kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti untuk penerapan ketentuan mengenai penyusunan SKP berdasarkan PP No.46 tahun 2011, dalam hal penyusunan SKP di BKD provinsi Sumatera Barat dibuat sesuai dengan SOTK dan RKT Instansi, pejabat penilai dan pegawai yang dinilai masih belum melakukan diskusi pembagian kerja untuk menyusun SKP. Masih adanya beberapa pegawai yang terlambat dalam penyerahan SKP tidak pada bulan Januari. Dalam hal penandatanganan SKP oleh pejabat penilai belum pernah ada penolakan untuk memberikan penilaian kepada pegawai yang dinilai. Penerapan ketentuan penilaian kinerja terhadap PNS melalui SKP di BKD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 7 PP No. 46 Tahun 2011 Penilaian kinerja berpedoman kepada SKP yang telah disetujui antara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. pejabat penilai akan memberikan penilaian dengan membandingkan target SKP dan realisasi kerja yang dilakukan selama satu tahun oleh pegawai dengan disertai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan, terkadang ada pejabat penilai yang sudah melihat kinerja pegawai yang dinilai setiap harinya tidak perlu lagi melihat bukti kegiatan tersebut langsung memberikan penilaian SKP.